

## **KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG INDUSTRI PERTAHANAN DAN ALUTSISTA TAHUN 2020-2023**

**Leidy Febian Ariani<sup>1</sup>**

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

### **ABSTRACT**

Modernization of the Main Weapon System (Alutsista) is crucial to strengthen Indonesia's national defense, as the largest archipelagic country. The Minimum Essential Force (MEF) policy aims to ensure adequate defense equipment, but its implementation has not been optimal due to the limited defense budget allocation, around 0.68% of GDP in 2019. Indonesia must prioritize the purchase of the latest defense equipment, increase the independence of the defense industry, and improve the quality of human resources. International cooperation with the US through the FMS and EDA programs supports the procurement of defense equipment, but the development of the domestic industry remains important. This research shows that Indonesia-United States defense cooperation includes defense equipment, education, military exercises, infrastructure development and humanitarian assistance, which strengthens Indonesia's capabilities and deepens the strategic partnership. The purpose of this study is to provide information about Indonesia-US cooperation in the defense industry and defense equipment and describe and analyze the collaboration. The research uses Neorealism theory to explain national interests and the concept of international cooperation. The method used is descriptive qualitative with data analysis techniques including reduction, presentation, and conclusion drawing, as well as validity tests to ensure the accuracy of the analysis.

Keywords: Defense Industry, Indonesia, America, MEF

### **ABSTRAK**

Modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) krusial untuk memperkuat pertahanan nasional Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar. Kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) bertujuan memastikan Alutsista memadai, tetapi implementasinya belum optimal karena alokasi anggaran pertahanan terbatas, sekitar 0,68% dari PDB pada 2019. Indonesia harus memprioritaskan pembelian Alutsista mutakhir, meningkatkan kemandirian industri pertahanan, dan memperbaiki kualitas SDM. Kerja sama internasional dengan AS melalui program FMS dan EDA mendukung pengadaan Alutsista, namun pengembangan industri domestik tetap penting. Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama pertahanan Indonesia-Amerika Serikat mencakup alutsista, pendidikan, latihan militer, pembangunan infrastruktur, dan bantuan kemanusiaan, yang memperkuat kapabilitas Indonesia dan memperdalam kemitraan strategis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang kerjasama Indonesia-AS dalam industri pertahanan dan alutsista serta mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi tersebut. Penelitian menggunakan teori Neorealisme untuk menjelaskan kepentingan nasional dan konsep kerja sama internasional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan untuk memastikan ketepatan analisis.

Kata Kunci : Industri Pertahanan, Indonesia, Amerika, MEF

## PENDAHULUAN

Dalam upaya memperkuat pertahanan nasional sebuah negara, maka dibutuhkan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista). Alutsista adalah sebuah faktor yang mendorong menguatnya bidang pertahanan negara. Alutsista sebuah negara harus modern dan canggih dan dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi Alutsista yang mutakhir dan *up to date*. Jika Alutsista sebuah negara tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi Alutsista yang terus menerus meningkat serta canggih, maka pertahanan negara tersebut akan tertinggal dari negara lainnya yang terus melakukan modernisasi Alutsistanya dan terus menerus menambah anggaran belanja militer negaranya.

Indonesia harus memodernisasi Alutsistanya karena dalam hal fisik Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Pada pertemuan III IUSSD (Indonesia US *Security Dialogue*) tahun 2005, masalah yang dibahas lebih beragam antara lain yaitu, situasi keamanan global dan regional, peran militer dalam penanggulangan bencana, upaya Indonesia melawan terorisme, manajemen sumber daya pertahanan, kerjasama *International Military Education and Training (IMET)*, *Foreign Military Financing (FMF)* dan *Foreign Military Sales (FMS)*. Saat itu, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono yang mengatakan bahwa pentingnya dialog agar saling memahami posisi, persepsi kebijakan antara kedua negara. Sedangkan delegasi AS dipimpin oleh B.G. John Allen, Principal Director for Asia and Pacific Affairs, International Security Affairs, Department of Defense, AS dan didampingi pejabat dari Kemlu AS, US Pacific Command, dan Kedutaan Besar AS di Jakarta. Dalam sambutannya Duta Besar AS untuk Indonesia Lynn B. Pascoe mengatakan dialog ini adalah forum yang tepat untuk bekerjasama dalam periode kritis dalam hubungan militer kedua negara. (Kemhan, 2010)

Minimum Essential Force (MEF) Indonesia meliputi tiga Rencana Strategis (Renstra): I (2010-2014), II (2015-2019), dan III (2020-2024). Saat ini, Alutsista Indonesia belum ideal, dengan peringkat kekuatan militer di urutan ke-16 global tetapi hanya sekitar posisi 30-50 untuk Alutsista. Usia rata-rata peralatan seperti pesawat tempur dan kapal perang tergolong tua. Evaluasi 2019 menunjukkan pencapaian MEF tahap II hanya 63,19%, jauh dari target 75,54%. Anggaran pertahanan 2020 mencapai Rp127,4

triliun, dengan Rp10,86 triliun dialokasikan untuk modernisasi, tetapi masih belum memenuhi target. Dibandingkan dengan Singapura yang mengalokasikan 3,3% dari PDB untuk pertahanan, Indonesia hanya mengalokasikan 0,68% dari PDB pada 2019. Terbatasnya anggaran berdampak pada pemenuhan Alutsista dan keamanan nasional. Indonesia memerlukan strategi efektif untuk implementasi MEF dan menghadapi ancaman potensial.

Pencapaian modernisasi Alutsista TNI melalui MEF hingga Renstra II belum sepenuhnya memuaskan. Target MEF untuk Matra Darat mencapai 74,62%, dengan kemajuan signifikan pada senjata ringan dan meriam, tetapi kendaraan tempur dan pesawat terbang belum mencapai target. Matra Udara dan Matra Laut juga belum memenuhi target yang ditetapkan, dengan pemenuhan Alutsista Matra Laut hanya mencapai 68,72%. Kebutuhan untuk modernisasi, seperti radar dan rudal, belum sepenuhnya terpenuhi.

Alutsista yang sudah tua dan pembelian bekas mengakibatkan tingginya angka kecelakaan, seperti jatuhnya pesawat dan kapal selam. Terbatasnya alokasi anggaran dan ketergantungan pada industri pertahanan luar negeri menunjukkan perlunya peningkatan dalam kemandirian industri pertahanan nasional dan kualitas SDM. Penting untuk membangun dan mengembangkan industri pertahanan domestik, meningkatkan kualitas SDM, dan memperkuat sistem pendidikan militer. MEF dirancang untuk mencapai 100% pada 2024, namun saat ini pencapaian masih jauh dari target. Upaya harus difokuskan pada perbaikan implementasi MEF dan pengembangan teknologi serta inovasi untuk mendukung pertahanan negara. (M.N, 2020) Untuk mencapai target MEF, Indonesia perlu fokus pada pengadaan Alutsista yang lebih maju dan sesuai dengan anggaran serta waktu yang terbatas. Pemerintah Indonesia juga menargetkan pengadaan Alutsista yang mandiri dari dalam negeri. Sejak 2010, Indonesia dan AS mempertinggi kerjasama pertahanan melalui perjanjian komprehensif yang disempurnakan pada 26 Oktober 2015. Kerjasama ini termasuk program pengadaan persenjataan oleh Defense Security Cooperation Agency (DSCA) dari Departemen Pertahanan AS, meliputi Foreign Military Sales (FMS) dan Excess Defense Articles (EDA). Berbeda dengan Direct Commercial Sales (DCS), FMS dilakukan melalui skema government-to-government (G2G). Negara yang tertarik mengajukan Letter of Request (LOR) untuk pengadaan, yang kemudian ditinjau dan disetujui oleh pemerintah AS dan, jika perlu, Kongres AS. Setelah

itu, DSCA mengeluarkan Letter of Offer and Acceptance (LOA) yang menjelaskan rincian pengadaan, yang kemudian dipublikasikan di situs resmi DSCA.(DoS, 2021)

Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis **Bagaimana Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dalam Bidang Industri Pertahanan dan Alutsista Tahun 2020-2023?** Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kerjasama Indonesia-Amerika Serikat dalam industri pertahanan dan alutsista, serta mendeskripsikan dan menganalisis kolaborasi tersebut secara mendalam. Peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yaitu

Artikel oleh Muhammad Ridha Iswardhana berjudul “Kerjasama Maritim Indonesia- Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard” membahas kerjasama pertahanan laut antara Indonesia dan Amerika Serikat, fokus pada kolaborasi antara BAKAMLA dan US Coast Guard dalam mendukung politik poros maritim Indonesia.(Iswardhana, 2021) Artikel yang ditulis oleh Farhan Fatah Dasopang dan Mansur Juned yang berjudul “Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat Pada Bidang Capacity Building Dalam Mengatasi Terorisme” berisi tentang Dalam meningkatkan kapabilitas keamanan Negara.(Dasopang, F. F. D., & Juned, 2022) Artikel oleh Beni Sukadis berjudul “Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat” menyoroti pentingnya dialog, peningkatan komunikasi, dan kunjungan tingkat menteri serta pejabat tinggi untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara kedua negara.(Sukadis, 2018) Penelitian ini menggunakan teori Neorealisme yang mendasari konsep kepentingan nasional dan konsep kerja sama internasional. Metode yang diterapkan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik analisis data mencakup reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan untuk memastikan keakuratan analisis.

## **PEMBAHASAN**

### **Hubungan Pertahanan Indonesia – Amerika Serikat**

Mengingat hubungan di bidang pertahanan dan keamanan mengandung dinamika kompleks serta tujuan politik berdasarkan kepentingan nasional, praktik Military Statecraft yang berlandaskan hard power memberikan gambaran bahwa hubungan

pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat tidak terlepas dari potensi tindakan koersif yang bersifat kontra produktif terhadap keberlangsungan kerja sama. Pembahasan potensi tersebut mengacu pada penilaian terhadap dua indikator, yaitu instrumen diplomasi koersif dan penggunaan kekuatan bersenjata.

Diplomasi koersif menjadi pendekatan alternatif yang dinilai lebih rasional dibandingkan penggunaan kekuatan bersenjata secara tradisional. Diplomasi koersif diartikan sebagai tindakan koersif bersifat non-kekerasan untuk mempengaruhi kebijakan negara lain untuk mengikuti atau patuh terhadap kebijakan yang dimilikinya. (Wolfley, n.d.) Pada konteks hubungan pertahanan Indonesia - Amerika Serikat, dinamika hubungan kedua negara tidak mencerminkan adanya penggunaan kekuatan bersenjata yang ditunjukkan oleh satu pihak untuk menekan pihak lainnya. Secara struktural, militer Amerika Serikat menunjukkan kekuatan yang superior dibandingkan dengan kekuatan militer Indonesia. Akan tetapi superioritas kekuatan militer Amerika Serikat tidak dijadikan sebagai alat tindakan koersif terhadap Indonesia. Faktor relasional juga menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Amerika Serikat tidak memosisikan satu sama lain sebagai ancaman. Terlebih, tidak ada penilaian situasi krisis yang menjustifikasi mekanisme penggunaan kekuatan bersenjata dalam hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Meskipun memiliki hubungan kerja sama yang mengedepankan praktik diplomasi secara damai, terdapat tantangan yang bersifat kontra produktif terhadap keberlangsungan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Permasalahan pertama mengacu pada pemberlakuan sanksi oleh Pemerintah Amerika Serikat di bawah Undang Undang Leahy terhadap satuan unit KOPASSUS yang hingga memasuki tahun 2020 tidak menunjukkan adanya perubahan kebijakan terkait pencabutan sanksi tersebut<sup>1</sup>. Sementara permasalahan kedua menitik beratkan pada sengketa hukum (legal dispute) antara kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia maupun Amerika Serikat terkait transparansi daftar awak kapal. Posisi Amerika Serikat yang mempertahankan kebijakan untuk merahasiakan daftar awak kapal perang angkatan laut dinilai Indonesia sebagai bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah. Sejumlah fenomena kontra produktif yang menjadi tantangan bagi hubungan pertahanan kedua negara tidak secara potensial mengarah pada penggunaan kekuatan bersenjata. Mengingat paradigma kontemporer yang memosisikan kontrol

terhadap penggunaan kekuatan bersenjata sebagai upaya terakhir (last resort), maka penekanan upaya diplomasi adalah langkah utama.

Selama langkah diplomasi tetap berjalan dalam hubungan pertahanan Indonesia Amerika Serikat, maka kecil adanya potensi penggunaan kekuatan bersenjata yang dipertimbangkan dalam mengatasi tantangan. Penilaian terhadap tantangan dan potensi tindakan koersif antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak mengindikasikan penggunaan unsur hard power dari konsep Military Statecraft sebagai kondisi yang secara signifikan mendasari hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat.

### **Hubungan Industri Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat**

Bagi Amerika Serikat, Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang ditetapkan Kongres pada tahun 2017 menjadi instrumen diplomasi koersif bagi negara-negara mitra pertahanan AS yang juga memiliki hubungan dengan negara yang dilabeli sebagai musuh oleh Amerika Serikat. (Tian, N., Kuimova, A., Da Silva, D. L., Wezeman, P. D., & Wezeman, 2019)

Pada Desember 2021, Indonesia secara resmi membatalkan rencana pembelian pesawat Rusia Sukhoi Su-35 dengan mengumumkan pesawat F-15 sebagai alternatif baru. Keputusan akhir tersebut diutarakan oleh Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fajar Prasetyo melalui keterangan resminya dengan mengindikasikan bahwa Indonesia tidak lagi berkepentingan membeli pesawat Sukhoi.

Keberadaan sanksi CAATSA di satu sisi berperan sebagai daya tekan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat. Di sisi lain, kedaulatan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kapabilitas pertahanan tidak memposisikan ancaman sanksi CAATSA sebagai alat koersif yang mempengaruhi pengambilan kebijakan negara. Keputusan Indonesia yang dinilai menjauhkan sanksi CAATSA merupakan bentuk pertimbangan teknis daripada pertimbangan politik. Pertimbangan teknis adalah perihal anggaran, spesifikasi teknologi, kesesuaian terhadap postur pertahanan, dan antisipasi risiko kerugian ekonomi. Pertimbangan terkait dampak keuntungan dan kerugian dalam menekan kerja sama pembelian alutsista menunjukkan bahwa Indonesia menentukan kebijakan sesuai dengan perhitungan rasional guna melindungi kepentingan nasional.

Sementara itu, potensi penggunaan kekuatan bersenjata berada dalam tingkatan perseturuan (hostility) yang tinggi dalam politik internasional. Mengingat kekuatan militer merupakan sumber daya nasional yang dimiliki negara sebagai upaya deterrence, pertahanan dan perang, maka penggunaan kekuatan bersenjata bisa jadi diposisikan sebagai kemampuan negara untuk mempengaruhi perilaku negara lain secara koersif. (Sinikiem, 2021)

Potensi penggunaan kekuatan bersenjata oleh aktor negara tertentu diukur melalui penilaian yang bersifat struktural, yakni terkait kemampuan/kekuatan militer negara sebagai alat mempengaruhi perilaku negara lain melalui ancaman dan tindakan koersif; dan penilaian relasional terkait tingkat ancaman yang terbentuk dari hubungan antarnegara.

Meskipun hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat didasarkan pada kerja sama yang mengedepankan diplomasi damai, terdapat beberapa tantangan yang bersifat kontra produktif terhadap keberlanjutan kerja sama tersebut. Tantangan pertama adalah pemberlakuan sanksi oleh Amerika Serikat terhadap unit KOPASSUS di bawah Undang-Undang Leahy, yang hingga tahun 2020 belum mengalami perubahan signifikan terkait pencabutan sanksi ini. Kedua, terdapat sengketa hukum terkait transparansi daftar awak kapal. Kebijakan Amerika Serikat yang merahasiakan daftar awak kapal perang angkatan lautnya dianggap oleh Indonesia sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah. Tantangan dalam hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat tidak secara langsung mengarah pada penggunaan kekuatan bersenjata. Mengingat paradigma kontemporer yang menempatkan penggunaan kekuatan sebagai upaya terakhir (last resort), diplomasi menjadi langkah utama (Sinikiem, 2021). Selama diplomasi berjalan, potensi penggunaan kekuatan bersenjata tetap kecil. Evaluasi tantangan ini tidak mengindikasikan adanya penggunaan hard power dari konsep Military Statecraft sebagai dasar signifikan dalam hubungan pertahanan kedua negara.

### **Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat**

#### **Bidang Industri Pertahanan**

Berangkat dari asumsi bahwa hubungan kerjasama pertahanan tidak terjadi secara sukarela, maka setiap negara mengatur strategi untuk mendatangkan keuntungan bagi

pembangunan kapabilitas pertahanan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan nasional. Pada dasarnya kerjasama pertahanan tetap memperhitungkan daya tawar dari masing-masing negara yang terlibat dalam suatu kerjasama strategis. Posisi dan daya tawar mencerminkan interelasi di antara pihak yang terlibat dalam kerjasama pertahanan dengan memperhitungkan keuntungan strategis.

Military Statecraft dalam hal ini mengakomodasi bentuk hubungan yang dilandasi oleh daya tawar dan/atau kemampuan ekonomi bagi kebutuhan pertahanan negara. Variabel ini menggambarkan daya tawar dan kemampuan ekonomi Indonesia sebagai unsur economic power melalui analisis terhadap dua indikator, yakni jaminan keamanan dan pengalihan alutsista. Jaminan keamanan atau security guarantee merupakan upaya negara pada kekuatan militer global dalam memberikan perlindungan kepada negara lain untuk mencegah ancaman konvensional, seperti ancaman agresi militer hingga ancaman penggunaan nuklir. Penekanan security guarantee berada pada dependensi keamanan sehingga dalam konteks kerja sama pertahanan, jaminan keamanan secara efektif berlaku bagi negara-negara yang diposisikan sebagai sekutu atau mitra. (Bleek, P. C., & Lorber, 2014) Security guarantee memiliki dua tujuan utama, yakni; meniadakan segala bentuk tindakan yang berpotensi mendatangkan reaksi ofensif dari pihak oponent; dan memberikan jaminan dan perlindungan bagi pihak sekutu agar motivasi proliferasi nuklir berkurang.

Hubungan pertahanan Indonesia-Amerika Serikat bersifat strategis, menekankan aspek keamanan tanpa menunjukkan aliansi formal. Indonesia tidak membutuhkan security guarantee dari Amerika Serikat, karena tidak berada di bawah payung perlindungan militer AS terhadap ancaman tradisional, baik agresi militer maupun nuklir. Sebagai pelopor Gerakan Non-Blok dan dengan prinsip bebas aktif, Indonesia mempertahankan netralitasnya tanpa ketergantungan pada jaminan keamanan dari negara lain. Kapabilitas militer Indonesia tidak mencerminkan keterikatan dengan aliansi pertahanan, termasuk yang dipimpin Amerika Serikat. Indonesia lebih memilih pendekatan balancing dan mendorong peran sentralitas ASEAN sebagai platform strategis bagi kepentingan regional, termasuk bagi Amerika Serikat.



Data ekspor alutsista 2020-2021 menunjukkan peningkatan kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat, terutama dalam aspek capacity building untuk pembangunan MEF Indonesia. Amerika Serikat menempati posisi teratas sebagai eksportir persenjataan ke Indonesia, dengan kontrak penjualan government-to-government senilai 1,88 juta USD melalui program Foreign Military Sales (FMS). Selain itu, Indonesia menerima hibah senilai 14 juta USD melalui program Foreign Military Financing (FMF) pada tahun 2020. (Skinner, 2023)

Kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat memberi Indonesia akses terbuka untuk pengadaan alutsista guna meningkatkan kapabilitas pertahanan. Namun, daya tawar ekonomi menjadi pertimbangan dalam pengalihan alutsista melalui program FMS dan FMF terhadap pembangunan MEF. Antara 2020-2024, kerja sama ini mencakup suku cadang, mesin, senjata misil, dan sistem radar yang penting untuk pertahanan udara dan laut.

Pada 2020, Indonesia menerima hibah 14 unit pesawat nirawak (UAV) dan tiga unit Bell 412 Helicopter Equipment. Pada 2021, delapan unit Scan Eagle 2 UAV diterima TNI AL melalui program Maritime Security Initiative untuk meningkatkan kemampuan Intelligence, Surveillance, Reconnaissance (ISR) TNI AL.

Tidak semua bentuk kerjasama pertahanan melalui program FMS terealisasi dalam rentang waktu tahun 2020-2023. Permasalahan akuisisi tersebut terhambat pada penyesuaian terhadap anggaran belanja pertahanan Indonesia. Di sisi lain, proses pengajuan proposal penjualan alutsista melalui program FMS yang disepakati Indonesia dan Amerika Serikat membutuhkan konfirmasi Kongres Amerika Serikat. (RI, 2020)

pesawat tempur F-15 dan F-18 guna regenerasi armada tempur F-16 TNI AU; dan drone tempur MQ1C Gray Eagle yang sedang dalam pertimbangan oleh pemerintah Amerika Serikat. Program FMS bersifat government-to-government, sehingga diplomasi pertahanan Indonesia menjadi kunci dalam mendukung pembelian alutsista. Kerja sama strategis dengan Amerika Serikat membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengakses alutsista melalui program ini tanpa hambatan khusus. Meskipun terdapat tantangan, Indonesia tidak memerlukan lobi khusus untuk mendapatkan akses ke FMS.

Kerja sama pertahanan kedua negara melibatkan aktivitas kooperatif antara institusi militer, menekankan pentingnya diplomasi pertahanan dalam memperkuat hubungan. Sebagai mitra strategis, Indonesia dan Amerika Serikat menggunakan pendekatan *shaping*— memanfaatkan kerja sama non-militer untuk mencapai kepentingan nasional. (Mcleary, P., & Hudson, 2021)

**Bidang SDM Pendidikan dan Pelatihan**

Kegiatan pendidikan dan pelatihan berkaitan erat dengan pembangunan MEF sebab berperan dalam pengembangan kualitas personel/ SDM serta penguatan institusi yang berkontribusi terhadap peningkatan kapabilitas pertahanan. Pendidikan dan pelatihan termasuk agenda kerja sama prioritas yang berlangsung secara berkelanjutan di setiap tahunnya. Indonesia menjadi salah satu negara mitra pertahanan yang mengirimkan personel militer untuk mengikuti pendidikan dan pertukaran perwira dalam jumlah besar.

Sejumlah program yang mewadahi agenda kerjasama ini antara lain; International Military and Education Training (IMET); Combating Terrorism and Irregular Warfare Fellowship Program (CTIWFP), Maritime Security Initiative (MSI), dan pelatihan khusus mengoperasikan alutsista FMS dan FMF (U.S. Department of State, 2022). Selain itu juga diperluas kerjasama keamanan siber dan peninjauan terkait Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive (CBRNE) sebagai bentuk pencegahan kebocoran dan penyalahgunaan kimia.

**Joint Military Exercise**

Kegiatan latihan militer bersama atau *joint exercise* menjadi manifestasi kerjasama pertahanan yang berimplikasi langsung dalam pengembangan ranah kemiliteran. Latihan bersama biasanya diselenggarakan sesuai spesifikasi matra, baik darat, laut, dan udara. Penyesuaian spesifik memungkinkan personel militer Indonesia dan Amerika Serikat untuk mengembangkan kemampuan tempur atau taktis sesuai dengan kebutuhan masing-masing matra. Agenda latihan bersama tidak hanya merefleksikan upaya meningkatkan kapabilitas pertahanan, melainkan juga penyatuan visi dan misi dalam menghadapi potensi ancaman dari sudut pandang Indonesia dan Amerika Serikat.

Salah satu latihan bersama antara TNI dan militer Amerika Serikat yang digelar rutin setiap tahun adalah Garuda Shield dengan rangkaian aktivitas pembekalan dan

pelatihan taktis, penguatan institusi, dan pengadaan workshop akademik bagi personel. (Salsabila, S., n.d.)

Salah satu latihan bersama antara TNI dan militer Amerika Serikat yang digelar rutin setiap tahun adalah Garuda Shield dengan rangkaian aktivitas pembekalan dan pelatihan taktis, penguatan institusi, dan pengadaan workshop akademik bagi personel. Latihan rutin Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) di matra laut meningkatkan kapabilitas dalam menyelam, medis, penerbangan, berbagi informasi, dan kesadaran maritim (U.S. Embassy Jakarta, 2021). Berbagai latihan gabungan antara Indonesia dan Amerika Serikat pada 2020-2024 termasuk JCET Arrow Iron di Bogor (matra udara), Garuda Shield-14 di Sentul (matra darat), PLATEX di Situbondo (matra darat), Reconex 2024 di Pulau Damar (matra laut), dan CARAT di Lampung (matra laut).

Diplomat militer berperan penting dalam memperkuat kerja sama pertahanan bilateral melalui komunikasi dan dialog. Kunjungan Menhan RI Prabowo Subianto ke Washington D.C. pada Oktober 2020 membahas keamanan regional dan akuisisi alutsista dengan Menhan AS Mark Esper. Kunjungan Pejabat Menhan AS Christopher Miller ke Jakarta pada Desember 2020 melanjutkan diskusi mengenai keamanan maritim dan pendidikan militer. Pada November 2021, Prabowo bertemu dengan Menhan AS Lloyd Austin di Bahrain dalam forum The Manama Dialogue (Kementerian Pertahanan, 2021), dan forum dialog tahunan terus membahas pertahanan bilateral.

Forum Indonesia-United States Security Dialogue (IUSSD) menjadi wadah bagi Indonesia untuk menyampaikan kepentingan serta kebutuhan dalam pembangunan MEF. Forum IUSSD ke-18 dan ke-19 pada tahun 2020-2021 diselenggarakan secara langsung di Pentagon, Washington D.C. Forum tersebut menghadirkan sejumlah inisiatif baru yang memperkuat kemitraan strategis pertahanan kedua negara, antara lain terkait perluasan lingkup latihan militer bersama, kolaborasi dalam domain maritim, keamanan siber hingga keamanan non konvensional perubahan iklim.

Agenda pertemuan military-to-military juga aktif dilakukan di tingkat matra. Pertemuan Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia dan AS pada Desember 2020 di Jakarta membawa misi peningkatan kerjasama & pertukaran budaya yang ditunjukkan melalui penampilan berbagai macam pakaian adat dan lagu daerah Indonesia. Pada kesempatan lain TNI AL dan Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengadakan kegiatan Staff Talks

untuk membahas persiapan sejumlah latihan bersama tahun 2022. Kegiatan tersebut juga membahas sejumlah area kerjasama seperti pendidikan, operasi khusus, bidang logistik, hukum dan pembinaan mental. (Fatimah, A., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, 2021)

### **Pembangunan Infrastruktur MEF**

Selaras dengan pembangunan MEF, pembangunan infrastruktur, sarana prasarana, dan industri pertahanan berperan penting dalam mendorong kemandirian Indonesia dalam mengembangkan kapasitas pertahanan. Mengingat terbatasnya penguasaan teknologi, Indonesia memerlukan bantuan teknologi dari negara lain yang mampu menunjang industri pertahanan dalam negeri. Terkait agenda industri pertahanan, hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kedua negara belum memiliki mekanisme alih teknologi untuk pembangunan industri pertahanan Indonesia dikarenakan faktor kebijakan Amerika Serikat yang membatasi alih teknologi pertahanan ke negara lain. Sistem kontrol ekspor persenjataan yang ketat hanya memungkinkan Amerika Serikat berbagi teknologi sensitif dengan negara sekutu.

Sejauh ini Indonesia dan Amerika Serikat telah menyepakati pembangunan fasilitas Pusat Pelatihan Maritim (Maritime Training Center) di Batam. Pembangunan tersebut merupakan kolaborasi antara Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dengan US Coast Guard. Fasilitas tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional BAKAMLA dalam hal meningkatkan kualitas SDM dari para personel. Dipastikan tidak ada penempatan pasukan Amerika Serikat dalam fasilitas tersebut. Pembangunan fasilitas ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan Indonesia dalam penjagaan keamanan dan perdamaian kawasan.

### **Humanitarian AID**

Misi kemanusiaan dan penanganan bencana merupakan bagian integral dari area kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Agenda ini termasuk upaya memperkuat kapabilitas pertahanan dalam menghadapi ancaman non-militer berupa bencana alam dan sosial secara adaptif. Pada masa pandemi COVID-19, keterlibatan militer dalam logistik dan pengawasan menjadi arah diplomasi pertahanan. Pemerintah Indonesia menerima bantuan alat kesehatan berupa 500 unit ventilator dari Pemerintah Amerika Serikat sebagai bentuk persahabatan dan solidaritas yang terjalin dalam hubungan bilateral kedua negara. (Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, 2020) Selain

ventilator, Indonesia juga menerima tiga unit mesin RT-PCR yang diperuntukkan untuk sejumlah rumah sakit TNI.

Bentuk kerja sama HADR juga ditunjukkan pada saat insiden tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan Bali pada April 2021 silam. Indonesia mengundang sejumlah negara sahabat untuk membantu pencarian kapal selam yang hilang termasuk Amerika Serikat. Permintaan tersebut ditanggapi Departemen Pertahanan dan militer Amerika Serikat dengan mengirimkan pesawat P-8 Poseidon untuk membantu proses pencarian berupa pesawat pengintai. Dalam rangka mitigasi bencana, kedua negara mengadakan latihan bertajuk

‘GEMA BHAKTI’ pada tingkat Mabes TNI dan kegiatan Pacific Airlift Rally pada tingkat matra udara sebagai upaya kerjasama dalam meningkatkan kemampuan serta kesiapan mitigasi bencana. (Bila, N. S., Haqqi, H., Wijayati, H., & Alchatib, 2024)

## **KESIMPULAN**

Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan standar pertahanannya melalui kerja sama internasional, termasuk dengan Amerika Serikat, yang berdampak signifikan pada pencapaian MEF tahap II (2015-2019). MEF meningkat dari 54,97% pada tahap I menjadi 63,19% pada tahap II, dan ditargetkan mencapai 70% pada akhir 2024. Kerja sama pertahanan dengan AS berfokus pada capacity building dan trust building, dengan program FMS dan FMF berkontribusi pada modernisasi alutsista, meski keterbatasan anggaran menjadi tantangan. Diplomasi pertahanan, yang mencerminkan co-optive power, memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kapabilitas Indonesia. Kerja sama ini, terlihat dari pengadaan alutsista, infrastruktur, dan latihan militer, mendukung pencapaian MEF dari tahap I hingga III.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bila, N. S., Haqqi, H., Wijayati, H., & Alchatib, S. R. (2024). Pengaruh United States Indonesia Comprehensive Partnership Agreement terhadap Kerja Sama Keamanan Maritim Amerika Serikat dan Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 9(2), 46–70.

- Bleek, P. C., & Lorber, E. B. (2014). *Security guarantees and allied nuclear proliferation. Journal of Conflict Resolution. 58(3), 429-454.*
- Dasopang, F. F. D., & Juned, M. (2022). Kerjasama Indonesia-Amerika Serikat pada Bidang Capacity Building dalam Mengatasi Terorisme. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, 3(1), 77-87.*
- DoS, U. (2021). *U.S. Arms Sales and Defense Trade.* <https://www.state.gov/u-s-arms-salesand-defense-trade/>
- Fatimah, A., Prakoso, L. Y., & Sudiarso, A. (2021). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut. *Jurnal Strategi Pertahanan Laut. Jurnal Strategi Pertahanan Laut, 7(3), 173-184.*
- Iswardhana, M. R. R. (2021). Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard. *JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN, 4(1), 1-15.*
- Kemhan. (2010). *Sekilas Hasil-hasil Indonesia-US Strategic Dialogue.* Kemhan.
- M.N, E. L. Z. & A. R. (2020). *Anggaran Pertahanan Indonesia Pemenuhan Minimum Essential Force.*
- Mcleary, P., & Hudson, L. (2021). *Biden administration wrestles with selling armed drones to Indonesia.*
- RI, D. D. K. K. E. (2020). *laporan singkat rapat dengar pendapat komisi VII DPR RI.*
- Salsabila, S., & S. (n.d.). H. Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pelatihan Peacekeeper Melalui Garuda Canti Dharma II. *Indonesian Perspective, 8(1), 24-47.*
- Sari, M. I., Sulistyani, Y. A., & Pertiwi, A. C. (2020). Peran Lembaga Pertahanan Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, 10(2), 189-208.*
- Sinikiem, A. (2021). Military Power and the Use of Force in International Politics: A Realist Perspective. *IJCSIRD, 7(1), 97-106.*
- Skinner, K. K. (2023). *Department of State. Foreword by Kevin D. Roberts, PhD Edited by Paul Dans and Steven Groves.*
- Sukadis, B. (2018). Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia Dan Amerika Serikat. *MANDALA: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, 1(1), 92-123.*

<b>DIPLOMACY AND GLOBAL SECURITY JOURNAL</b> <b>Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional</b> <b>Vol. 1, No. 1 Tahun 2024 Hal. 470-484</b> <b>e-ISSN: _____ DOI: 10.36859/dgsj.v1i1.2895</b>	Article History: <i>Submitted: Sept 10, 2024</i> <i>Accepted: Oct 24, 2024</i> <i>Published: Oct 27, 2024</i>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tian, N., Kuimova, A., Da Silva, D. L., Wezeman, P. D., & Wezeman, S. T. (2019). *Trends in world military expenditure*.

Wolfley, K. J. (n.d.). *Military Statecraft and the Rise of Shaping in World Politics*. Rowman & Littlefield.